



LAPORAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta Tahun 2020 telah selesai disusun yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum 13 IKU tersebut telah berhasil dilaksanakan yang terlihat dari total skor kinerja menurut Aplikasi PRISMA pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,30.

Kedepannya diharapkan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pencapaian IKU tahun 2021 sehingga target-target kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat meningkat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2020

Kepala Perwakilan,

arivatna

DAFTAR ISI

			Halaman
KA7	CA P	ENGANTAR KEPALA PERWAKILAN	i
DAF	TA	R ISI	ii
DAF	TA	R GAMBAR	iv
DAF	TA	R TABEL	v
BAE	3 I	PENDAHULUAN	1
	A.	Latar belakang	1
	B.	Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	1
	C.	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	3
		1. Sekretariat Perwakilan	3
		2. Subauditorat BPK	4
	D.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	5
BAE	3 II	PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. Yogyakarta	11
	A.	Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	11
	В.	Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	12
		AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK KILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA)	18
	Pen	capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	18
	Stra	tegi Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	20
	IKU	J 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	20
	IKU	J 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	20
	IKU	J 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	21
	IKU	J 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	21
	IKU	J 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	22
	IKU	J 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	22
	IKU	J 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	22
	IKU	J 8 Hasil Evaluasi AKIP	23
	IKU	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	23
	IKU	J 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	23
	IKU	J 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	24
	IKU	J 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	24

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran		
Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Rencana Strategis	27	
BAB IV PENUTUP	29	
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	3
Gambar 1.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Gambar 1.3	Data Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa	7
Gambar 1.4	Data Pegawai Menurut Umur	8
Gambar 1.5	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Gambar 1.6	Data Jenis Pekerjaan Tenaga Kontrak	9
Gambar 2.1	Peta Strategis AKN V	12

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan	5
Tabel 1.2	Jabatan Fungsional Pemeriksa	6
Tabel 1.3	Pegawai Menurut Umur	7
Tabel 1.4	Jenjang Pendidikan Pegawai	8
Tabel 1.5	Jenjang Pendidikan Tenaga Kontrak	9
Tabel 1.6	Jenis Pekerjaan Tenaga Kontrak	9
Tabel 1.7	Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020	10
Tabel 2.1	Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi	
	D.I. Yogyakarta.	11
Tabel 2.2	Rencana Aksi 2020 Perwakilan D.I. Yogyakarta	. 12
Tabel 3.1	Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020	. 18
Tabel 3.2	Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020	. 26

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja mandiri yang ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

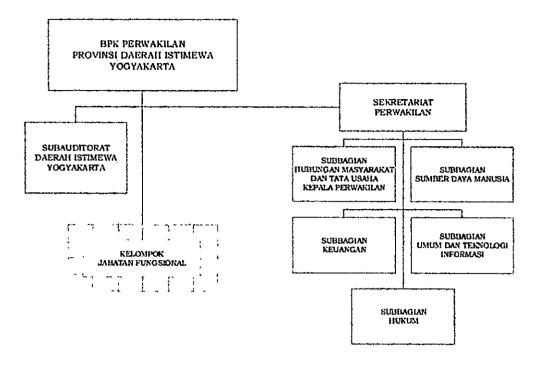
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya AKN V didukung oleh beberapa satker eselon II. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kota/kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Sedangkan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah :

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah unsur pelaksana BPK, yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (AKN V) yang terdiri dari:

- 1. Sekretariat Perwakilan;
- 2. Subauditorat Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan penyusunan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta terdiri dari :

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sub Auditorat Daerah Istimewa Yogyakarta

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;

- menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- 11) melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan; dan
- menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

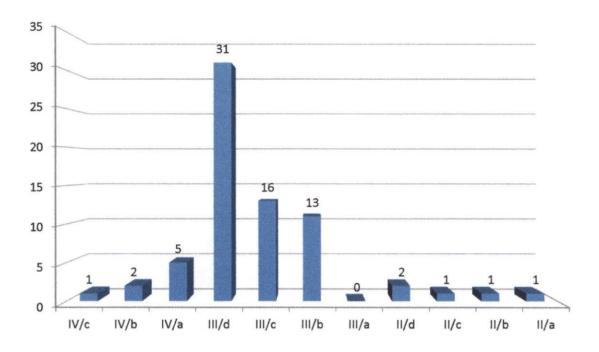
1. Sumber Daya Manusia

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai dengan per 31 Desember 2020 memiliki jumlah SDM sebanyak 93 orang yang terdiri dari 68 pegawai PNS dan 25 pegawai tidak tetap/kontrak. Berikut ini adalah data bezetting pegawai tetap di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2020:

Data Pegawai berdasarkan jenjang Pangkat dan Golongan

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3.	Pembina		5
4.	Penata Tingkat I	III/d	31
5.	Penata	III/c	13
6.	Penata Muda Tingkat I	IV/c IV/b IV/a III/d	11
7.	Penata Muda	III/a	-
8.	Pengatur Tingkat I	II/d	2
9.	Pengatur	II/c	1
10.	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
11.	Pengatur Muda	II/a	1
	Jumlah		68



Gambar 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

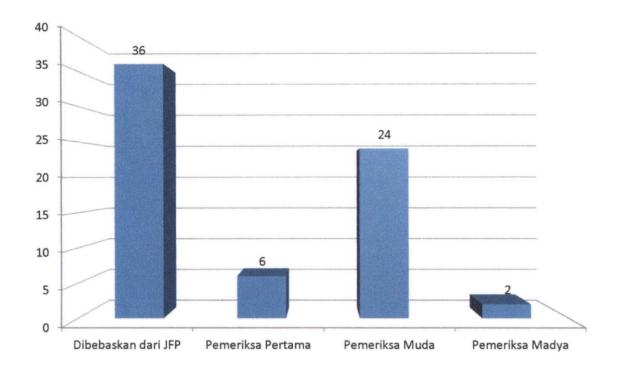
Menurut Jabatan Struktural

Kepala Perwakilan: 1Kepala Sub Auditorat: 1Kepala Sekretariat Perwakilan: 1Kepala Subbagian: 5Jumlah Total: 8

b. Data Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa

Tabel 1.2 Jabatan Fungsional Pemeriksa

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Pemeriksa Madya	2
2	Pemeriksa Madya Pemeriksa Muda Pemeriksa Pertama Dibebaskan dari JFP	24
3	Pemeriksa Madya Pemeriksa Muda Pemeriksa Pertama	6
4	Pemeriksa Madya Pemeriksa Muda Pemeriksa Pertama Dibebaskan dari JFP	36
	JUMLAH	68

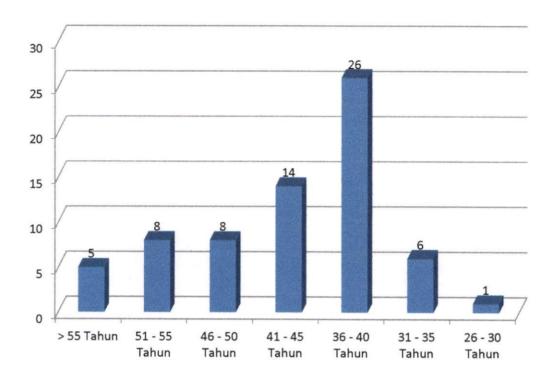


Gambar 1.3 Data Pegawai Menurut Jabatan Fungsional Pemeriksa

c. Data Pegawai Menurut Umur

Tabel 1.3 Pegawai Menurut Umur

No.	Umur	Jumlah
1	> 55 Tahun	5
2	51 - 55 Tahun	8
3	46 - 50 Tahun	8
4	41 - 45 Tahun	14
5	36 - 40 Tahun	26
6	31 - 35 Tahun	6
7	26 - 30 Tahun	1
	Total	68

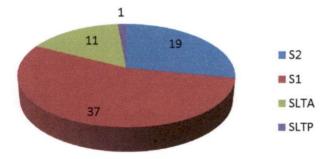


Gambar 1.4 Data Pegawai Menurut Umur

d. Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pegawai

Tabel 1.4 Jenjang Pendidikan Pegawai

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	19
2	Strata 1	37
3	SLTA	11
4	SLTP	1
	Total	68



Gambar 1.5 Data Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

Sedangkan data pegawai tidak tetap (tenaga kontrak) di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Status Kepegawaian:

Tenaga Kontrak : 25

Jumlah Total : 25

1. Data Tenaga Kontrak Menurut Jenjang Pendidikan

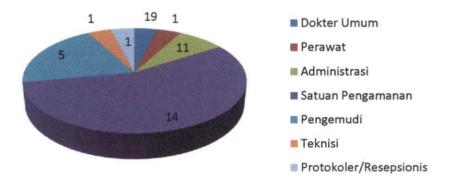
Tabel 1.5 Jenjang Pendidikan Tenaga Kontrak

No	Pendidikan	Jumlah
1	S1/D4	2
2	Sarjana Muda/D3	2
3	SLTA	20
4	SLTP	1
	Total	25
		1

b. Data Jenis Pekerjaan Tenaga Kontrak

Tabel 1.6 Jenis Pekerjaan Tenaga Kontrak

NO	Pendidikan	Jumlah
1	Dokter Umum	1
2	Perawat	1
3	Administrasi	2
4	Satuan Pengamanan	14
5	Pengemudi	5
6	Teknisi	1
7	Dokter Umum Perawat Administrasi Satuan Pengamanan Pengemudi Teknisi Protokoler/Resepsionis	1
	Total	25



Gambar 1.6 Data Jenis Pekerjaan Tenaga Kontrak

2. Anggaran

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk tahun 2020 sebesar Rp18.517.382.000,00, secara rinci dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.7 Anggaran BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020

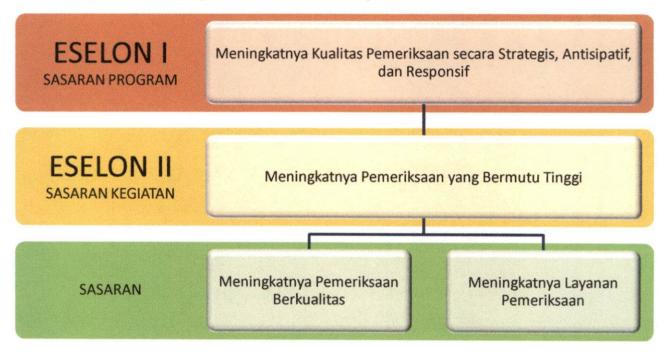
			Rencana		
No	Jenis Output		Anggaran (Rp)		
Renc	ana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)				
1.	LHP Interim/Pendahuluan				
	LHP Keuangan	12	1.473.780.000,00		
	LHP Kinerja	5	173.570.000,00		
	LHP DTT	6	247.996.000,00		
2.	LHP Perwakilan D.I. Yogyakarta				
	LHP Keuangan	6	852.631.000,00		
	LHP Kinerja	5	333.637.000,00		
	LHP DTT	6	830.542.000,00		
3.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	56	64.992.000,00		
4.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	12	83.852.000,00		
5.	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	12	120.932.000,00		
6.	Rumusan Bahan Pendapat	1	2.612.000,00		
7.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	296.367.000,00		
8.	Sumbangan IHPS	2	45.438.000,00		
9.	Laporan Profil Entitas	2	5.110.000,00		
	JUMLAH RKP	1	4.531.459.000,00		
REN	CANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG				
1.	Layanan Sekretariat Perwakilan	20	1.223.543.000,00		
	Layanan Hukum Perwakilan		116.896.000,00		
	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan		312.950.000,00		
	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan		261.237.000,00		
	Layanan Keuangan Perwakilan		214.576.000,00		
	Layanan Umum Perwakilan		317.884.000,00		
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	3.702.368.000,00		
3.	Layanan Perkantoran	1	9.060.012.000,00		
	Gaji dan Tunjangan		4.818.544,000,00		
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 1	4.241.468.000,00		
	JUMLAH RKSP		13.985.923.000,00		
	JUMLAH RKP DAN RKSP	1	18.517.382.000,00		

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Adapun sasaran strategis oleh AKN V adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 - Peta Strategis AKN V

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Untuk mengukur pencapaian sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyusun Strategi, Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020. Berikut ini Sasaran, Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020:

Tabel 2.1 Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Sasaran	Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	Target	
		IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	
Demiulu Tilliggi	Layanan Pemeriksaan	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	

Sasaran	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%

B. Perencanaan Operasional BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Untuk tahun anggaran 2020, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menetapkan Target Pencapaian Kinerja Tahunan dan Triwulanan yang diungkap dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2020 sebagai berikut:

Str	ategi/Sasaran/	Target	F	Rencana Per	ncapaian Ki	nerja	Rencana	n
	Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020	TW I	TWII	TWIII	TWIV	Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualit	as Pemeriks	aan Secara	Strategis	, Antisipat	if, dan Res _l	oonsif	
Sasaran	Meningkatnya Pemer	iksaan yang	Bermutu '	Tinggi				
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	70%	100%	Desember	Triwulan I: Membentuk Tim Perencanaan Pemeriksaan Membentuk Tim Reviu Opini Melaksanakan diklat teknis Triwulan II: Melaksanakan knowledge transfer forum Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan equal treatment atas permasalahan yang sama Triwulan III: Melakukan evaluasi pemeriksa Triwulan IV:

Str	rategi/Sasaran/	Target	1	Rencana Pen	capaian Kir	nerja	Rencana	Daniel Vicintos dellas
Indikator	Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020	TW I	TWII	TWIII	TWIV	Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan equal treatment atas permasalahan yang sama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: Membentuk Tim Perencanaan Pemeriksaan dan Membentuk Tim Reviu Opini Melaksanakan diklat teknis
								Triwulan II: Melaksanakan knowledge transfer forum Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan equal treatment atas permasalahan yang sama
								Triwulan III: Melakukan evaluasi pemeriksaan
								Triwulan IV: • Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan equal treatment atas permasalahan yang sama
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: • Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Rekomendasi yang bersifat administrasi dikomunikasikan kepada pemda untuk segera menyampaikan bukti tindak lanjut.
								Triwulan II: Workshop percepatan tindak lanjut dengan peserta admin dan inputer dari inspektorat; Pemantauan tindak lanjut reguler per semester.
								Triwulan III: Workshop percepatan tindak lanjut dengan peserta
								Triwulan IV: Pemantauan tindak lanjut reguler per semester.
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional
	Tematik Nasional							Triwulan II: Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional
								Triwulan III: Menyusun usulan tim pemeriksa kinerja sesuai dengan minat
								Triwulan IV: Mengikuti konsinyering pelaporan pemeriksaan kinerja

Str	rategi/Sasaran/	Target	I	Rencana Pen	capaian K	inerja	Rencana	Rencana Kegiatan dalam
Indikator	Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020	TW I	TWII	TWIII	TWIV	Waktu Penyelesaian	RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: Menyusun tim pemeriksaan sesuai dengan RKP dan mempertimbangkan permintaan pemeriksaan dengan memperhitungkan kemampuan anggaran dan sumber daya
								Triwulan II: Mempertimbangkan permintaan pemeriksaan dengan memperhitungkan kemampuan anggaran dan sumber daya
								Triwulan III: Menyusun tim pemeriksaan sesuai dengan RKP dan mempertimbangkan permintaan pemeriksaan dengan memperhitungkan kemampuan anggaran dan sumber daya
								Triwulan IV: Mempertimbangkan permintaan pemeriksaan dengan memperhitungkan kemampuan anggaran dan sumber daya.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-		100%	Desember	Triwulan I: Mengidentifikasi isu strategis lokal Triwulan II: Mengidentifikasi isu strategis lokal dan mempertimbangkannya sebagai fokus pemeriksaan kinerja
								Triwulan III: Mengusulkan revisi perubahan tema pemeriksaan berdasarkan identifikasi isu strategi lokal Menyusun usulan tim pemeriksa kinerja Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan
								Triwulan IV: Melaksanakan pemeriksaan terinci
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-		Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I: Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam ST. Triwulan II:
								Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam ST. Triwulan III:
								 Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam ST.

Str	ategi/Sasaran/	Target	I	Rencana Per	capaian K	inerja	Rencana	Panana Variata delan
	Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020	TW I	TWII	TWIII	TWIV	Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan IV: Internalisasi nilai-nilai dasar dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Mencantumkan nilai-nilai dasar dalam ST.
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	-	-	-	A (86,00)	Desember	
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	Desember	Triwulan I: Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfataan IT dan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Triwulan II: Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfataan IT dan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Triwulan III: Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfataan IT dan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja. Triwulan IV: Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfataan IT dan himbauan memanfaatkan IT dalam setiap pengarahan dan rapat unit kerja.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	-	-	-	100%	Desember	
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-		Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I: Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pernyataan Independensi sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan Whistler Blower System Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online Triwulan II: Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pernyataan Independensi sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan Whistler Blower System Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online Triwulan III:

Str	ategi/Sasaran/	Target		Rencana Pen	capaian Kir	nerja	Rencana	
Indikator	Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020	TW I	TWII	тwш	TWIV	Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								 Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pernyataan Independensi sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan Whistler Blower System Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online Triwulan IV:
								Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; Membuat Pernyataan Independensi sebelum melaksanakan pemeriksaan; Menyediakan Whistler Blower System Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan Online
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	25%	50%	75%	100%	Desember	 Triwulan I: Membuat Laporan Monitoring jam pelajaran diklat setiap bulan; Menyampaikan Nota Dinas Penawaran Diklat berdasarkan Kalender Diklat Triwulan I kepada seluruh pegawai; Membuat Usulan Peserta Diklat dan disampaikan Kepada Badiklat PKN berdasarkan ND usulan masing-masing subbagian; Melakukan monitoring terhadap usulan peserta diklat; Berkoordinasi dengan Badiklat PKN terkait diklat satker (Diklat Pemeriksaan LKPD). Triwulan II: Membuat Laporan Monitoring jam pelajaran diklat setiap bulan; Menyampaikan Nota Dinas Penawaran Diklat berdasarkan Kalender Diklat Triwulan II dan Triwulan III kepada seluruh pegawai; Membuat Usulan Peserta Diklat dan disampaikan Kepada Badiklat PKN berdasarkan ND usulan masing-masing subbagian; Melakukan monitoring terhadap usulan peserta diklat. Triwulan III: Membuat Laporan Monitoring jam pelajaran diklat setiap bulan; Melakukan monitoring terhadap usulan peserta diklat. Triwulan III: Membuat Laporan Monitoring jam pelajaran diklat setiap bulan; Menyampaikan Nota Dinas Penawaran Diklat berdasarkan Kalender Diklat Triwulan III dan Triwulan IV; Membuat Usulan Peserta Diklat dan disampaikan Kepada Badiklat

Str	rategi/Sasaran/	Target	I	Rencana Per	capaian Ki	nerja	Rencana	
Indikator	Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2020	TW I	TWII	тwш	TWIV	Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								PKN berdasarkan ND usulan masing-masing subbagian; Melakukan monitoring terhadap usulan peserta diklat. Triwulan IV: Membuat Laporan Monitoring jam pelajaran diklat setiap bulan; Menyampaikan Nota Dinas Penawaran Diklat berdasarkan Kalender Diklat Triwulan IV dan Triwulan I tahun berikutnya (akhir tahun); Membuat Usulan Peserta Diklat dan disampaikan Kepada Badiklat PKN berdasarkan ND usulan masing-masing subbagian.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87%	87%	87%	87%	Desember	Triwulan I: Sosialisasi di awal tahun terkait anatomi anggaran perwakilan dan strategi pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja; Menyusun dokumen pemantauan pelaksanaan Anggaran; Melakukan revisi anggaran jika diperlukan; Melakukan rekon LK dengan KPPN secara bulanan. Triwulan II: Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I; Menyusun dokumen pemantauan pelaksanaan anggaran; Melakukan revisi anggaran jika diperlukan; Melakukan rekon LK dengan KPPN secara bulanan. Triwulan III: Melakukan rekon LK dengan KPPN secara bulanan. Triwulan III: Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan II; Melakukan rekon LK dengan KPPN secara bulanan; Menyusun dokumen pemantauan pelaksanaan Anggaran; Melakukan revisi anggaran jika diperlukan Triwulan IV: Melakukan revisi anggaran jika diperlukan Sosialisasi tentang langkahlangkah akhir tahun untuk memperlancar pertanggungjawaban kegiatan di masing-masing unit kerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Berikut adalah pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk Tahun 2020:

Tabel 3.1 Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020

	Strategi (S) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Realisasi 2020	Skor 2020	Skor 2019	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8
S	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strateg	is, Antisipati	f, dan Respons	if		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,67%	91,67	100	Indikator ini merupakan penggabungan dari sebagian IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP (tingkat konsistensi dan akurasi LHP), IK 2.1.1 Pemenuhan QC dan QA Pemeriksaan dengan skor masing-masing 100, serta ditambahkan penilaian Hasil Reviu Itama
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	100	Pada tahun 2019 merupakan sebagian dari IK 1.1.3 Tingkat Tingkat Evaluasi LHP (Kesesuaiar antara simpulan dengan Harapan Penugasan) dengan skor 100
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	84,29%	105	102,63	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,46%	105	N/A	
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100	100	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan

	Strategi (S) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Realisasi 2020	Skor 2020	Skor 2019	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8
						Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	104%	104	N/A	
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	Sangat Memuaskan (5,00)	100	93,6	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (85,82)	99,79	100	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,53%	104,77	104,66	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	125%	105	100	Indikator ini merupakan penggabungan dari IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang disusun, IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice dengan skor masingmasing 100, serta ditambahkan penilaian Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,83)	100,79	105	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100	100	Indikator ini merupakan penggabungan dari IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa dan

	Strategi (S) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Realisasi 2020	Skor 2020	Skor 2019	Keterangan
1	2	4	5	6	7	8
						IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa) dengan skor masing-masing
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	92,05%	105	105	Pada tahun 2019, indikator ini merupakan IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

STRATEGI: MENINGKATNYA KUALITAS PEMERIKSAAN SECARA STRATEGIS, ANTISIPATIF, DAN RESPONSIF

SASARAN KEGIATAN: MENINGKATNYA PEMERIKSAAN YANG BERMUTU TINGGI

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode sampling.

Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Pada tahun 2020, Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melakukan proses QC dan QA atas 6 LHP LKPD, 5 LHP Kinerja, dan 6 LHP PDTT dengan target IKU 1 sebesar 100% dan realisasi sebesar 91,67%.

IKU 1 belum mencapai target yang ditetapkan karena pada salah satu komponen penilaian yaitu hasil evaluasi EPP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan terdapat catatan evaluasi. Perwakilan D.I. Yogyakarta akan meningkatkan QC dan QA atas LHP yang diterbitkan pada masa yang akan datang dengan cara menambah waktu serta lebih cermat dalam proses QA dan QC atas konsep LHP.

Atas IKU 1, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 91,67.

IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satuan kerja pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada tahun 2020, target IKU 2 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

IKU 2 dapat tercapai karena dalam proses pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa selalu berpedoman pada P2 sehingga pada saat proses pelaporan sampai dengan LHP diterbitkan, simpulan yang dihasilkan sesuai dengan harapan penugasan.

Atas IKU 2, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada tahun 2020, target IKU 3 sebesar 75% dengan realisasi sebesar 84,29%.

IKU 3 dapat tercapai dengan cara:

- 1. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- 2. Rekomendasi yang bersifat administrasi dikomunikasikan kepada auditee agar dapat segera ditindaklanjuti.
- 3. Melakukan pemantauan secara reguler.

Atas IKU 3, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada tahun 2020, target IKU 4 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100,46%.

IKU 4 dapat tercapai karena dalam proses perencanaan pemeriksaan, Perwakilan D.I. Yogyakarta selalu menyelaraskan dengan kebijakan pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan.

Atas IKU 4, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100,46.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsivitas BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Pada tahun 2020, target IKU 5 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Standar penilaian IKU 5 yaitu 100%, bila terdapat permintaan perhitungan kerugian negara dan sebagainya maka nilai dapat bertambah. Selama tahun 2020 belum ada permintaan dari pemangku kepentingan sehingga atas IKU 5, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pada tahun 2020, target IKU 6 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 104%.

IKU 6 dapat tercapai karena Perwakilan D.I. Yogyakarta dalam merencanakan pemeriksaan berdasarkan pada isu strategis dan relevan dengan kondisi entitas serta diselaraskan dengan RPJMD dan SDG's dimana Perwakilan D.I. Yogyakarta melaksanakan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada 4 entitas yaitu Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman.

Atas IKU 6, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 104.

TKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 =sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3.00 - 3.99 = memuaskan

4,00 - 5,00 =sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Pada tahun 2020, target IKU 7 sebesar 5 dengan realisasi sebesar 5. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- o AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- o A = Memuaskan (>80-90)
- o BB = Sangat Baik (>70-80)
- o B = Baik (>60-70)
- $\circ \quad CC = Cukup (>50-60)$
- o C = Kurang (>30-50)
- o D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Pada tahun 2020, target IKU 8 sebesar A (86,00) dengan realisasi sebesar A (85,82). Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 99,79.

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada tahun 2020, target IKU 9 sebesar 95% dengan realisasi sebesar 99,53%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 104,77.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pada tahun 2020, target IKU 10 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 125%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Skala hasil survei:

1,00 - 1,99 =sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3.00 - 3.99 = memuaskan

4,00 - 5,00 =sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Pada tahun 2020, target IKU 11 sebesar 3,80 dengan realisasi sebesar 3,83. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100,79.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut:

- 1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- 2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).
- 3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru.

Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pada tahun 2020, target IKU 12 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1. Penyerapan anggaran
- 2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi
- 3. Pencapaian keluaran
- 4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktivitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dibidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran.

Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada tahun 2020, target IKU 13 sebesar 87% dengan realisasi sebesar 92,05%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

			Rencana		Realisasi	Capaian (%)	
No	Jenis Output	Vol	Anggaran (Rp)	Vol	Anggaran (Rp)	Vol	Anggaran
Renc (RKP)	ana Kegiatan Pemeriksaan)						
1.	LHP Interim/Pendahuluan			_			
	LHP Keuangan	12	1,473,780,000,00	12	1.433.829.500,00	100	97,29
	LHP Kinerja	5	173.570.000,00	5	165.719.300,00	100	95,48
	LHP DTT	6	247.996.000,00	6	232.011.100,00	100	93,55
2.	LHP Perwakilan D.I. Yogyakarta				ı	-	
	LHP Keuangan	6	852,631,000,00	6	808.722.400,00	100	94,85
	LHP Kinerja	5	333.637.000,00	5	285.796.600,00	100	85,66
	LHP DTT	6	830.542.000,00	6	718.130.500,00	100	86,47
3.	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik	56	64.992.000,00	56	45.200.500,00	100	69,55
4.	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	12	83.852.000,00	12	70.151.000,00	100	83,66
5.	Laporan Pemantauan 5. Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah		120.932.000,00	12	34.708.500,00	100	28,70
6.	Rumusan Bahan Pendapat	1	2.612.000,00	1	2.612.000,00	100	100
7.	Layanan Administrasi Pemeriksaan	12	296,367,000,00	12	182.654.993,00	100	61,63
8.	Sumbangan IHPS	2	45.438.000,00	2	43,938,078,00	100	96,70
9,	Laporan Profil Entitas	2	5.110.000,00	2	5.103.000,00	100	99,86
	JUMLAH RKP		4.531.459.000,00		4.028.577.471,00		88,90
	ANA KEGIATAN SEKJEN PENUNJANG (RKSP)						
1.	Layanan Sekretariat Perwakilan	20	1.223.543.000,00	20	1.217.899.018,00	100	99,54
	Layanan Hukum Perwakilan		116.896.000,00		116.711.701,00		99,84
	Layanan Kehumasan dan Tata Usaha Perwakilan		312.950,000,00		311.502.827,00		99,53
	Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan		261.237.000,00		260.772,963,00		99,82
	Layanan Keuangan Perwakilan		214.576,000,00		213.561.233,00		99,52
	Layanan Umum Perwakilan		317.884.000,00	315.350.294,00			99,20
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	3.702.368.000,00	1	3.689.433.000,00	100	99,65
3.	Layanan Perkantoran	1	9.060.012.000,00	1	8.800.708.627,00	100	97,14
	Gaji dan Tunjangan		4.818.544.000,00		4.586.079.669,00		95,17
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		4,241.468.000,00		4.214.628.958,00		99,36
	JUMLAH RKSP		13.985.923.000,00		13.708.040.645,00		98,01
	JUMLAH RKP DAN RKSP		18.517.382.000,00		17.736.618.116,00		95,78

PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan target kinerja 5 tahun.

Inc	Strategi (S) dikator Kinerja Utama (IKU)	Та	rget Kinerja 5	Tahun berdasa	DIY	Target Riil 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian 2020 dibanding target	
		2020	2021	2022	2023	2024			tahun 2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
S	Meningkatnya I	Kualitas Peme	riksaan Secara	Strategis, An	tisipatif, dan l	Responsif			
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91,67%	91,67%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	75%	84,29%	112%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,46%	100,46%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100%
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)	A (86)	A (85,82)	99,79%
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	95%	95%	95%	95%	99,53%	104,77%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	125%

Strategi (S) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Та	rget Kinerja 5 '	Target Riil 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian 2020 dibanding target			
		2020	2021	2022	2023	2024			tahun 2024
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,83)	100%
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	89%	91%	93%	95%	87%	92,05%	96,89%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2020 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini merupakan perwujudan pencapaian kinerja baik itu keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya good governance yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah berhasil dalam melaksanakan sasaran strategis indikator kinerja utama yang terlihat dari pencapaian pada tahun 2020 sebesar 101,30. Namun demikian masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target secara optimal yaitu:

- IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA



BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

PERIODE: DES / TW 4 / SEM 2 / TAHUN / 2020

Derianijan Kineria / Pera Strategi Detail Sonrerard Indikator Kineria Keluaran (IKK)

lama	Jenis	Periode	Target PK	Target	Realisasi	Sco
BPK Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta	Scorecard	Triwulan				101.3
 Sasaran Kegiatan. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi 	Sasaran Strategis	Triwulan				101.3
 IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan 	IKU	Triwulan	100,00%	100.00%	91,67 %	91.67
 IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan 	IKU	Triwulan	100,00%	100,00%	100.00 %	100
IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	IKU	Triwulan	75,00%	75,00%	84,29 %	105
 IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional 	IKU	Triwulan	100,00%	100,00%	100.46 %	100.46
 IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan 	IKU	Triwulan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
 IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal 	IKU	Triwulan	100,00%	100,00%	104,00 %	104
IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	IKU	Tahunan	5.00	5.00	5.00	100
IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	IKU	Triwulan	86,00	86.00	85.82	99.79
 IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 	IKU	Triwulan	95,00%	95,00%	99,53 %	104.76
 IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 	IKU	Triwulan	95.00%	95,00%	99.53 %	104.76
 IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan 	IKU	Triwulan	100,00%	100,00%	125,00 %	105
IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	IKU	Tahunan	3,80	3,80	3.83	100.79
 IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi 	IKU	Triwulan	100,00%	100,00%	100,00 %	100
IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran	IKU	Triwulan	87.00%	87,00%	92,05 %	105